

**Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung Pada Masa Pemerintahan Desa dan
Pemerintahan Nagari, Tahun 1983-2018**

skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Pada Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas*

OLEH

RAFILDO YULIO SANDY

1510712027



Dosen Pembimbing

Dr. Nopriyasman, M.Hum

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sejarah Pemerintahan di Nagari Sitiung Masa Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari, tahun 1983-2018”. Skripsi ini mengkaji tentang corak pemerintahan di Sitiung pada masa pemerintahan desa dan pemerintahan nagari, serta dampak dari pemekaran Kabupaten Dharmasraya terhadap Nagari Sitiung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik (kritik intern dan kritik ekstern), interpretasi, dan historiografi. Tahap awal adalah melakukan pengumpulan sumber baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan melalui bacaan-bacaan referensi yang berkaitan dengan Nagari Sitiung, kemudian wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berhubungan dengan perkembangan pemerintahan di Nagari Sitiung. kemudian data yang diperoleh dilanjutkan ke tahap kritik sumber. Tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan.

Setelah diterapkannya pemerintahan desa di Sumatera Barat, maka nagari berubah menjadi desa. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa hanya menjalankan fungsi administrasi pemerintahan umum saja, karena desa bukan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat. Diterapkannya pemerintahan desa tentu memberikan beberapa dampak di tengah masyarakat di Nagari Sitiung, adapun beberapa dampaknya yaitu masyarakat menjadi terkotak-kotak dan silaturahmi antar masyarakat menjadi renggang.

Setelah sistem pemerintahan desa kembali ke sistem pemerintahan nagari maka kembali pulalah model pemerintahan lama di Nagari Sitiung. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Kembalinya sistem pemerintahan nagari memberikan dampak terhadap masyarakat. Dampak itu antara lain kembalinya kebersamaan masyarakat yang sebelumnya terkotak-kotak oleh pemerintahan desa.

Tahun 2004 terjadi pemekaran Kabupaten Dharmasraya yang menyebabkan peningkatan status Nagari Sitiung menjadi kecamatan. Pemekaran Kabupaten Dharmasraya banyak memberikan keuntungan. Misalnya salah satu keuntungan yang didapat di bidang pertanian yaitu para petani lebih banyak mendapat perhatian dari pemerintah dengan mendapatkan berbagai bantuan seperti pupuk, bibit unggul dan pelatihan pertanian. Sehingga petani di Nagari Sitiung dapat meningkatkan hasil panen dari sebelumnya.

Kata Kunci : Pemerintahan, Nagari, Desa